BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dalam penelitian ini menunjukkan rata-rata tingkat kepatuhan pengungkapan wajib (DISC) adalah 0,782185 atau sebesar 78,22% untuk tahun anggaran 2015 sampai dengan 2019 pada laporan keuangan pemerintah kabupaten dan kota di provini Sumatera Selatan. Tingkat kepatuhan pengungkapan wajib (DISC) mengalami peningkatan pengungkapan informasi yang menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan telah berusaha untuk terus memperbaiki kualitas pengungkapan informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa:

Secara parsial:

1. Variabel independen yaitu Ukuran Legislatif (LEG) terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib (DISC).
2. Variabel independen yaitu Temuan Audit BPK (FIND) terbukti tidak memberikan pengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib (DISC).

Secara simultan:

Semua variabel independen yaitu Ukuran Legislatif (LEG) dan Temuan Audit BPK (FIND) secara bersama-sama atau secara simultan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib (DISC) memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 serta F-hitung lebih besar dari F-tabel yaitu 29,142>3,11. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen bersama-sama memiliki pengaruh.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka ada beberapa hal yang disarankan terkait dengan penelitian, antara lain:

1. Variabel Ukuran Legislatif (LEG) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib (DISC). Diharapkan variabel bebas tersebut dapat terus menjadi pertimbangan bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam meningkatkan pengungkapan informasi pada laporan keuangan pemerintah daerah agar pelaporan yang disampaikan dalam LKPD menjadi lebih baik setiap tahunnya.
2. Variabel Temuan Audit BPK yang tidak memberikan pengaruh dengan proksi perhitungan jumlah temuan audit. Sebaiknya tidak hanya diproksikan dengan jumlah temuan sistem pengandalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan, karena nilainya tidak material. Penggunaan jumlah temuan audit BPK dapat digantikan dengan proksi kualitas temuan dapat digunakan dalam menentukan tingkat materialitas suatu temuan.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar menambah luas wilayah penelitian, yakni pemerintah kabupaten dan kota se-Indonesia untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.
4. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel independen lain yang diperkirakan dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib seperti tingkat penyimpangan hasil audit BPK dan rekomendasi tindaklanjut hasil audit BPK.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar, N.B., 2013. "Disclosure of Accountability Information in Public Sector Annual Report: The Case of Malaysian Federal Statutory Bodies". *Tesis*. Universiti Malaya. Malaysia.

Abu Hasan, N.S., dkk., 2008. "Disclosure Quality of Malaysian Local Government Financial Report". *Conference Paper*.

Amaliah, E. F., dan Haryanto. 2019. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017". *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. Vol.8(2), 1-13.

Andriani, M., dkk. 2019. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014-2016". *Akuntansi dan Manajemen.* Vol.14(1), 1-14.

Azhar, K., & Setyaningrum, D. 2015. Pengaruh Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Korupsi Kementerian / Lembaga di Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

--------- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2020. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020.

--------- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2019. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019.

--------- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2018. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018.

--------- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Ikhtisar HasilPemeriksaan Semester I Tahun 2017.

--------- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Ikhtisar HasilPemeriksaan Semester I Tahun 2016.

--------- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2019.

--------- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2018.

--------- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2017.

--------- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2016.

--------- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2015.

Basniwati, AD. 2017. "Pengawasan DPRD dan Kendala-Kendala yang Dihadapi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah". *Jurnal Hukum Jatiswara*.

Bastian, Indra. 2015. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.

Bastian, Indra. 2018. Audit Sektor Publik. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

Erlina, dkk. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Jakarta: Salemba Empat.

Faidzal Abu, M., dkk. 2012. "Annual report mandatory disclosures in Malaysian Federal Statutory Bodies". *IEEE Symposium on Business, Engineering and Industrial Applications*.

Feriyanti, Meri., dkk. 2015. "Determinan Kepatuhan pada Ketentuan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat". *Jurnal Infestasi*. Vol.11(2), 171-185.

Fuadi, M.Z., dan Asmara, J. A 2020. "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemandirian Daerah, Penerimaan Dari Pemerintah Pusat, Ukuran Legislatif, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Aceh)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA).* Vol.5(1), 96-106.

Ghozali. 2018. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam dan A. Chairi. 2007. Teori Akuntansi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro.

Halim, Abdul dan Kusufi. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.

Hendriyani, R., dan Tahar, A. 2015. "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia". *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*. Vol.22(1), 25-33.

Jaya, D. J., dan Sisdyani, Eka Ardhani. 2014. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Pada Kelengkapan Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah Melalui Situs Resmi Pemerintah Provinsi". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 9(1), 162-179.

Idris, A. L., dkk. (2018). The Determinan Disclosure of Internet Financial Reporting in District and City Government in Indonesia. *IJER -Internet J. Eco. Res.*

Jaya, D. J., dan Sisdyani, Eka Ardhani. 2014. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Pada Kelengkapan Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah Melalui Situs Resmi Pemerintah Provinsi". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 9(1), 162-179.

Jensen, M. C. and Meckling, W. H. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*. Vol.3, 305-360.

Khasanah, N. L., dan Rahardjo, S. N. 2014. "Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Studi pada LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2010- 2012)". *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol.3(3), 1-11.

Kusuma, Rianti., dkk. 2021. "Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Suatu Tinjauan Empiris". *Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*. Vol.2, 581-591.

Lane, Jan-Erik. 2000. "The Public Sector–Concepts, Models and Approaches". London: *SAGE Publications*.

Nurtari, Amanita., dkk. 2015. "Laporan Keuangan (Studi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2013-2014)". Jurnal Infestasi. *Prosiding Akuntansi*. Vol.2(1), 263-269.

Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemenrintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar AkuntansiPemerintahan.

Permendagri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Priyatno. 2018. Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS. Yogyakarta:

Media Kom.

Purniasari, Cici. 2016. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2014). *Jurnal Naskah Publikasi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

Puspita, R., dan Martani D. 2012. Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemda. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*.

Rafidah., dkk. 2019. "Pengaruh *Intergovernmental Revenue*, Kekayaan Pemerintah Daerah dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah)". *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, dan Objektif*. Vol.1(2), 63-70.

Setyaningrum, D., dan Syafitri, F. 2012. "Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol.9(2), 154-170.

Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Suhardjanto, D., dan Yulianingtyas, R. R. 2011. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)". *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. Vol.(1), 30-42.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang BadanPemeriksa Keuangan (BPK).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Waliyyani, G.M., dan Mahmud, A. 2015. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia". *Accounting Analysis Journal*. Vol.4(2), 1-7.

Winarna, J., and Murni, S. 2007. "Pengaruh Personal Background, Political Background, dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006)"**.** *Simposium Nasional Akuntansi X*.

Zulfikar. 2013. "Pengaruh Karakteristik Pemda Berupa Ukuran Pemda, Tingkat Kekayaan, Tingkat Ketergantungan, dan Belanja Daerah serta Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia pada Anggaran 2007". *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.